
**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK, DESENTRALISASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA MANAJEERIAL PEMERINTAHAN DAERAH
(Studi Kasus SKPD Kabupaten Bireuen)**

Oleh

Ikhyanuddin

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Email: ikhyanuddin@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of budgetary participation, public accountability, decentralization and internal control systems on the managerial performance of local governments in 2020. This type of research is quantitative using secondary data. The population in this study were all SKPDs of Bireun Regency. The sample was selected using a purposive sampling method and obtained 52 SKPDs of Bireuen Regency. The data analysis technique in this study used multiple linear regression analysis and moderated regression analysis were processed using SPSS version 25. The results showed that by means of the t- test of Participation in Budgeting, Public Accountability had an effect on the Managerial Performance of Local Government in SKPD Bireuen Regency in 2020. Decentralization, the Internal Control System has no effect on the Managerial Performance of the Regional Government in the SKPD of Bireun Regency in 2020. The results of the F-test show that Participation in Budgeting, Public Accountability, Decentralization and the Internal Control System have an effect on the Managerial Performance of Local Government in the SKPD of Bireuen Regency in 2020 .

Keywords: Managerial Performance, Participation in Budgeting, Public Accountability, Decentralization & Internal Control Systems.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang baik menjadi isu kebijakan strategis karena pelayanan publik sangat berimplikasi luas khususnya dalam memperbaiki kepercayaan kepada pemerintah. Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih menjadi masalah utama yaitu belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang ditunjukkan dengan masih banyaknya keluhan-keluhan dari masyarakat atas pelayanan pemerintah daerah selama ini sehingga menimbulkan citra kurang baik terhadap pemerintah (Puspitasari dan Bandesa, 2016).

Kinerja sektor publik sebagian besar dipengaruhi oleh kinerja aparatur pemerintah, hal ini dikarenakan semakin baiknya kinerja seorang manajer maka

semakin baiknya kinerja organisasi tersebut. Manajer adalah orang yang melakukan dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan melalui orang lain (Nugraheni, 2015).

Kinerja manajerial merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisasi, khususnya organisasi sektor publik yang mana kinerja manajerial merupakan hasil kerja organisasi dalam menjalankan kegiatan pelayanan masyarakat (Apriyanti, 2017). Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Kinerja pemerintah dinilai dari bagaimana organisasi tersebut memberikan

layanan terbaik dengan mendayagunakan sumber daya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani (Nuryanti,

2012). Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kinerja manajemen, tidak sekedar input tetapi juga pada output dan outcome. Norma dan prinsip anggaran tersebut meliputi transparansi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan format anggaran. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip salahsatunya adalah pertanggungjawaban keuangan.

Kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggung jawaban yang mulai dari proses awal sampai dengan pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan harus mempertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Selain faktor partisipasi anggaran, desentralisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial, yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada manajer. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari jenjang yang lebih tinggi ke jenjang lebih rendah untuk mengambil kebijakan secara independen. Penyerahan kewenangan dalam bentuk desentralisasi mengenai tugas-tugas pemerintah, diharapkan aspirasi masyarakat daerah dapat dibangun.

Namun demikian Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang di utuskan ke Kabupaten Bireun masih menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bireun, walaupun permasalahan

tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan Bireun. Menurut

Syarifuddin Lubis, permasalahan yang di temukan dalam pemeriksaan BPK berupa temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Adapun temuan SPI antara lain :(1) pengelolaan uang di bendahara belum sepenuhnya tertib, (2) penagih utang pajak restoran belum optimal, dan (3) pengelolaan aset berupa peralatan dan mesin yang hilang dan dikuasai oleh pihak lain belum sepenuhnya memadai. Masalah kepatuhan yang melenceng dari anggaran pemerintah antara lain: (1) kelebihan pembayaran belanja pegawai pada PNS cuti bersama dan tugas belajar, (2) pengelolaan dan pertanggung jawab dana BOS susah sesuai ketentuan dan (3) kelebihan pembayaran pada badan penanggulangan bencana daerah. Faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja manajerial pemerintah daerah adalah Partisipasi penyusunan anggaran akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern.

System pengendalian internal adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelapran keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang.

Pertanggung jawaban keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Pertanggungjawaban keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika setiap pemerintah daerah telah mampu menerapkan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap aktivitas penyusunan anggarannya, maka SKPD yang berkualitas akan tercapai dengan semestinya.

Konsistensi

pertanggungjawaban keuangan tidak hanya pada saat rencana anggaran disusun, tetapi juga pada saat implimentasi dan pengawasan anggaran di lapangan.

Dalam menyusun anggaran setiap tahunnya tim anggaran eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) menerima input dari setiap SKPD. Selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPA) untuk menyusun RAPBD.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Kabupen Bireun)”

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah?
3. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah?
5. Apakah partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah?

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

3. Pengaruh desentralisasi terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.
4. Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan kinerja manajerial pemerintah daerah.
5. 5. Peartisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan serta menambah pengalaman dibidang penyusunan anggaran dan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan dibangku kuliah.
2. Bagi Pemerintah, Membantu pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Bireun untuk meningkatkan kinerja manajerial yang berkenaan dengan desentralisasi, ketika terjadi ketidakpastian lingkungan, teknologi informasi, serta budaya organisasi.

LANDASAN TEORI

Teori Artribusi

Atribusi (Attribution Theory) Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku penyelenggara anggaran. Teori atribusi (Attribution Theory) pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider (1958). Teori atribusi ini merupakan sebuah teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang dan mempelajari proses bagaimana seseorang mengintepretasikan atau menafsirkan terjadinya suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya.

Kinerja Manajerial SKPD

Perencanaan adalah penentuan kebijakan dan sekumpulan kegiatan untuk selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi waktu sekarang dan yang akan datang.

1. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan.
2. Evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh pimpinan terhadap rencana yang telah dibuat, dan ditujukan untuk menilai pegawai dan catatan hasil kerja sehingga dari hasil penilaian tersebut dapat diambil keputusan yang diperlukan.
3. Pengawasan, yaitu penilaian atas usulan kinerja yang diamati dan dilaporkan atau kemampuan untuk mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan.

Kinerja (performance) adalah capaian tingkat pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang ada dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering diartikan sebagai prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu (Mahsun, et.al, 2006:). Kinerja manajerial merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Ingkiriwang, 2013). Tujuan pokok kinerja adalah untuk memotivasi tujuan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan dengan melalui umpan balik kerja (Sumolang, 2015).

Sehingga, kinerja manajerial merupakan salah satu jawaban berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Ayu dan Dahen 2014). Keberhasilan seorang manajer diukur dari seberapa baiknya ia dalam mengolah apa

yang dipercayakan kepadanya atau seberapa rapih, teratur, atau indahnya dalam proses memimpin organisasinya, tetapi yang terpenting adalah manajer melakukan hal-hal yang benar untuk kepentingan bersama (Sigilipu, 2013). Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun et.al 2015.).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Brownell (1982) dalam Puspaningsih (2002) menjelaskan partisipasi merupakan suatu proses yang melibatkan individu-individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka.

Beberapa hal yang mempengaruhi faktor partisipasi anggaran menurut (Welsch a Glenn 2000) terdapat tiga hal sebagai berikut:

1. Keterlibatan

Berhubungan dengan keterlibatan karyawan dalam menyusun anggaran yang terkait dengan bagian yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Pengaruh

Berhubungan dengan seberapa besar pengaruh yang dirasakan oleh karyawan terhadap final budget.

3. Komitmen/Kontribusi

Berhubungan dengan seberapa penting kontribusi yang diberikan karyawan dalam penyusunan anggaran Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran melibatkan berbagai pihak, terdapat dua metode partisipasi yang dapat dilakukan dalam proses penyusunan anggaran, yaitu dengan metode top-down dan bottom up. Metode bottom up adalah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh manajemen level bawah selanjutnya dilanjutkan oleh manajemen tingkat menengah dan disahkan oleh manajemen atas Menurut Apriyandi (2011) dalam hal ini partisipasi

anggaran mempunyai dampak positif dalam organisasi sektor publik yaitu:

1. Meningkatkan kebersamaan manajemen dalam hal pencapaian tujuan anggaran karena anggaran yang ada merupakan anggaran yang ditetapkan bersama.
2. Meningkatkan kinerja karena merasa bertanggungjawab dalam pencapaian rencana anggaran yang telah disusun bersama.
3. Menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang dihadapi yang diperoleh dari bawahan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan meningkatkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Ernawilis, 2015).

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pada otoritas yang lebih tinggi misalnya pertanggung jawaban daerah kepada pemerintah pusat, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Menurut Sulistoni (2003) pemerintah yang *accountable* memiliki ciri - ciri sebagai berikut:

- ❖ Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- ❖ Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- ❖ Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah Melalui pertanggung jawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Menurut Mardiasmo (2004), dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas agar dapat berfungsi dengan baik perlu diterapkan:

- ❖ Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program.

- ❖ Pola pengukuran tujuan, seta tujuan dibuat dan hasil da diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil.

- ❖ Pengakomodasian sistem intensif, suatu sistem intensif perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem intensif harus diterapkan dengan hati-hati, karena adakalanya sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.

- ❖ Pelaporan dan penggunaan data, suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan akan berguna jika dirancang dengan hati-hati, dan berguna bagi pemimpin, pembuat keputusan dan program serta masyarakat.

Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Mardiasmo (2009) dalam Wahyuni (2014). Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum.

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Desentralisasi

Mendelegasikan wewenang dari manajemen tingkat atas kepada manajemen tingkat bawah merupakan salah satu cara yang sering digunakan dalam pengendalian kegiatan organisasi. Desentralisasi dengan memberikan pertanggungjawaban untuk berbagai tugas bagi manajer tingkat bawah merupakan mekanisme organisasi yang dapat menjamin bahwa tugas-tugas dapat dilaksanakan dan tujuan organisasi akan dapat dicapai (Abdullah, 2007).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Desentralisasi

1. Ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi.
Bila keputusan di pegang oleh manajemen puncak, maka organisasi tidak mungkin dapat berjalan dengan efisien dan efektif, karena bila ada masalah yang mendesak harus lewat manajer puncak yang tentunya memakan waktu yang lama, bagi organisasi yang besar cenderung akan memperbesar desentralisasi dalam kegiatan.
2. Strategi dan lingkungan organisasi.
Factor ini sangat penting sekali dalam ,ememtukan bentuk yang akan di ambil, yang selanjutnya akan mempengaruhi derajat desentralisasi.
3. Penyebaran geografis desentralisasi.
Semakin menyebar geografis cenderung organisasi menggunakan desentralisasi
4. Struktur organisasi memiliki peranan dalam mempengaruhi kinerja (efisiensi dan efektifitas) pada tingkat organisasi maup tingkat sub unit (Anthony et.al, 2004 dala Riharjo 2006). Desentralisasi adalah delegasi otoritas pembuatan keputusan

dalam organisasi dengan memberikan otoritas kepada manajer dalam berbagai tingkat operasional untuk membuat keputusan yang terkait dengan bidang pertanggung jawabannya (Garrison al at, 2006). Alasan dibutuhkannya desentralisasi menurut Lubis (2011):

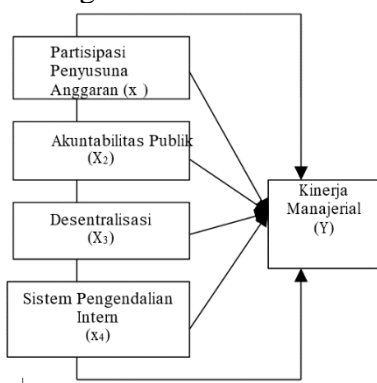
1. Desentralisasi membebaskan manajemen puncak untuk fokus pada keputusan-keputusan strategi jangka panjang dan bukannya terlibat dalam keputusan-keputusan operasi.
2. Desentralisasi memungkinkan organisasi untuk memberikan respons secara cepat dan efektif terhadap masalah karena mereka yang berada paling dekat dengan suatu masalah (manajer lokal) memiliki informasi yang paling baik dan oleh sebab itu dapat memberikan respons lebih baik terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal.
3. Sistem yang tersentralisasi tidak mampu menangani semua informasi rumit yang diperlukan untuk membuat keputusan yang optimal. Keputusan-keputusan yang tersentralisasi mungkin lebih inferior dibandingkan dengan keputusan-keputusan yang dibuat secara lokal dalam suatu sistem yang terdesentralisasi.
4. Pelimpahan wewenang tentunya disertai dengan pelimpahan tanggung jawab sehingga tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggung jawabkan anggaran dan pencapaian realisasi dari target yang telah ditetapkan. Dengan adanya desentralisasi, tiap-tiap satuan kerja dapat meningkatkan kinerjanya karena mereka mengetahui kondisi masyarakat dan dapat menetapkan program-program yang tepat sasaran (Miah dan Mia, 1996 dalam Wahyuni, 2014).

b. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan

c. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan. Dari pendapat ahli di atas, penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan ialah berasal dari dalam dan luar organisasi

Tujuan utama dari pengawasan internal tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, tetapi juga untuk membantu pihak yang diawasi dalam menjalankan tugasnya secara lebih baik. Fungsi pengawasan internal dalam struktur organisasi pemerintah Indonesia dalam arti luas diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral Pembangunan (Halidayati, 2014).

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Bireun, waktu penelitian dilaksan. Adapun penelitian dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Desember sampai 31 Desember 2020, di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen dengan objek penelitian adalah proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan diteliti.

Table 1. Sampel dan Populasi

NO	SKPD	Jumlah SKPD	Sampel	Jumlah
1	Dinas	21	2	42
2	Sekteriat	5	2	10
3	Inspektoral	1	2	2
4	Staf Ahli	1	2	2
5	Badan Daerah	5	2	10
6	Rumah Sakit Umum	1	2	2
7	Kecamatan	18	2	36
	Jumlah	52		104

Teknik Pengambilan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode sensus, dalam proses pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data antara lain dengan wawancara, pengamatan atau observasi, kuesioner, pengujian, arsip dan dokumen- dokumen (Indrintoro dan Supomo, 2014). Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 5 poin skala likert, variabel yang diukur dengan skala likert yaitu partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi dan sistem Pengendalian intern terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas

Seleksi atau dasar pengambilan keputusan item yang valid dengan cara membandingkan nilai hasil korelasi Product Moment dari Pearson dengan taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 104 di peroleh rtabel sebesar 0.707 Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan (Tabel 4.6) diketahui bahwa item-item dalam angket Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Dari hasil perhitungan dari uji linier

berganda di peroleh nilai (Y) dengan model regresi = 20.212 dan koefesien regresi (X) dari variabel-variabel independen diperoleh $X_1=0.400$, $X_2=(-0.027)$, $X_3=0.253$ DAN $X_4=(-0,162)$ berdasarkan nilai konstan dari koefesien regresi tersebut, maka hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen dalam model regresi dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$Y = 20.212 + 0.400X_1 - 0.027X_2 + 0.253X_3 - 0.162X_4.$$

Dari persamaan diatas dijelaskan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 20.212 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik desentralisasi, dan sistem pengendalian intern adalah sebesar 20.212.

b. Koefisien Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar 0.400 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya partisipasi penyusunan anggaran satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial pemerintah daerah meningkat sebesar 0.400 atau 4% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

c. Koefisien akuntabilitas publik sebesar -0.027 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya akuntabilitas publik satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial pemerintah daerah menurun sebesar -0.027 atau -2,7% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

d. Koefisien struktur desentralisasi sebesar 0.253 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan struktur desentralisasi satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial pemerintah daerah meningkat sebesar 0.253 atau 25,3% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap.

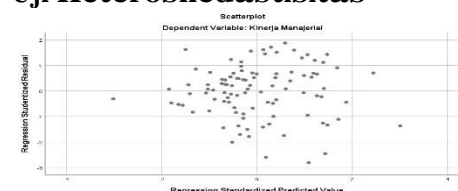
e. Koefisien Sistem Pengendalian Intern sebesar -0.162 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan adanya system pengendalian intern satu satuan SKPD, maka kinerja manajerial pemerintah daerah menurun sebesar -0.162 atau -16.2

% dengan asumsi variabel lain tidak tetap.

Koefisien Determinasi (R²)

Dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,098 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 98% variabel dependen (Partisipasi anggaran, Akuntabilitas, Desentralisasi, dan Pengawasan Internal) dapat dijelaskan oleh hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa setiap variabel independennya memiliki nilai tolerance > 0,1, kecuali Akuntabilitas Publik yang memiliki nilai tolerance memiliki nilai < 1 dan nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas



dapat diketahui bahwa grafik scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acal serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedestisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat Partisipasi penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi, dan Sistem Pengendalian Intern berdasarkan variabel independen.

Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.365 ^a	.133	.098	5.983	1.742

a. Predictors: (Constant), pengawasan_internal, akuntabilitas, desentralisasi, partisipasi_anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja_manajerial

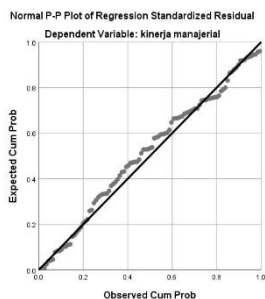
Berdasarkan hasil output SPSS 25 pada tabel 4.12 nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.742, sehingga dapat disimpulkan terdapat autokorelasi pada regresi ini.

Coefficients

		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Partisipasi	.896	1.116
	Penyusunan		
	anggaran		
	Akuntabilitas	.997	1.003
	Desentralisasi	.922	1.085
	Sistem	.967	1.034
	Pengendalian		
	Intern		

a. Dependent Variable: Kinerja_manajerial

Uji Normalitas



Grafik normal probability plot menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal P-Plot terlihat jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

Uji Parsial (Uji t)

Membandingkan nilai t hitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika t hitung > t tabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai t tabel pada α = 0,05 adalah 1.659. Untuk variabel partisipasi penyusunan anggaran (X1) nilai thitung adalah 3.043 dan nilai sig adalah 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa t hitung > ttabel, yaitu 3.043 > 1.659. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung > ttabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1.659. Untuk variabel akuntabilitas publik (X2) nilai thitung adalah 3,432 dan nilai sig adalah 0.005. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,432 > 1.659 dan nilai

signifikansi $0.005 < \alpha < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung < ttabel dan sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1.659. Untuk variabel desentralisasi (X3) nilai T hitung adalah -0,144 dan nilai sig adalah 0.889. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung < ttabel, yaitu -0,144 < 1.659. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima.

Hasil analisis dari tabel, dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dan ttabel. Hipotesis diterima jika thitung < ttabel dan nilai sig < α 0,05. Nilai ttabel pada α = 0,05 adalah 1.659. Untuk variabel pengawasan internal (X4) nilai thitung adalah -1.208 dan nilai sig adalah 0.230. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa thitung < t tabel, yaitu -1.063 < 1.659 dan nilai signifikansi 0.230. < α 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal (X3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah, sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak diterima.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) Hasil pengolahan data uji F menunjukkan nilai F = 4.146 dan signifikan pada 0.008. Sedangkan nilai F tabel yaitu 4.102. Jadi F hitung > F tabel yaitu 4.146 > 2.493 dan sig. $0.008 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix. Berarti, model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, Akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern, simultan

berpengaruh signifikan terhadap Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah SKPD Kabupaten Bireun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran (X1) Terhadap Kinerja Manajerial H1 berpengaruh dan disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten bireun.
2. Akuntabilitas Publik (X2) terhadap Kinerja Manajerial H2 diterima dan disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten bireun.
3. Desentralisasi (X3) Terhadap Kinerja manajerial H3 diterima dan disimpulkan bahwa desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja manjerial satuan kerja perangkat daerah kabupaten bireun.
4. Sistem Pengendalian Intern (X4) terhadap Kinerja Manajerial H4 tidak diterima maka kesimpulannya bahwa Pengawasan internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial di daerah kabupaten bireun.
5. Hasil uji-f variable independen (Partisipasi Penyusunan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern) berpengaruh terhadap variable dependen (Kinerja manajerial pemerintah daerah) pada SKPD Kabupaten Bireuen tahun 2020.

Keterbatasan

1. Jawaban responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara.
2. Masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja manajerial

tersebut seperti motivasi kerja, karakteristik sasaran anggaran, dan lain- lain.

3. Kemungkinan responden tidak menjawab secara serius atau tidak jujur dan peneliti tidak mengetahui apakah yang mengisi kuesioner benar-benar responden yang bersangkutan.

Saran

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah sebaiknya meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem pengendalian intern agar kinerja manajerial pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pembelajaran dan referensi.
3. Bagi penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Apriyanti, H, W. (2017), Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi kerja sebagai variabel pemoderasi. Jurnal akuntansi indonesia. Vol.6, No.2, Hal.141-156.
- [2] Afrida, N. (2013), Pengaruh desentralisasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja manajerial SKPD Kota Padang. Artikel ilmiah.
- [3] Arifin Solikhun. (2012), Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Semarang).
- [4] Abdullah, M. (2017). Pengaruh desentralisasi, ketidakpastian lingkungan dan pengendalian akuntansi terhadap

- kinerja manajerial pada Pemerintah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. ISSN: 1411-0393.
- [5] Apriyanti, H, W. (2011), Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan motivasi kerja sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal akuntansi indonesia*. Vol.6, No.2, Hal.141-156.
- [6] Brownell.P. (1982), Participation in Budgeting Process: When it Works and When it Doesn't, *Journal of Accounting Literature*, Vol.1, pp. 124-153.
- [7] Darmawan, R. (2016), Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran Anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. *Jom fekom*. Vol.3, No.1.
- [8] Ernawilis. (2015), Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantang Singing. *Jom fekom*, 2(2), 1-14.
- [10] Ghozali, Imam. (2013), Aplikasi Analisis Multivariates dengan Program IBM SPSS 21.Update PLS RegresiI, edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [11] Ghozali, Imam,(2011), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [12] Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C.(2006), *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba empat. Edisi 1. Halaman 1.
- [13] Ingkriwang, O. C. (2013), Pengaruh desentralisasi dan sistem akuntansi manajemen terhadap kinerja manajer dealer di manado. *Jurnal EMBA*. ISSN: 2303-117. Vol. 1, No. 3. Hal. 818-825.
- [14] Indra Bastian. (2013), *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- [15] Lubis, A. I. (2011), *Akuntansi keperilakuan*. Jakarta. Penerbit salemba empat, Edisi kedua. Halaman 358, 380. ISBN: 978-979-061-048-4.
- [16] Mardiasmo. (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Edisi pertama. ISBN: 979-533-713-0.
- [17] Mardiasmo.(2009).*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- [18] Mahoney, T.A., T.H. Jerdee and S.J. Carroll,(1963), *Development of managerial Performance: A Research Approach*, Cincinnati: South Western Publ.Co
- [19] Mila Suhardini, Kamaliah dan M.Rasuli. (2014), Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, dan Sistem Teknologi Informasi terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi* Vol. 22, No. 3.
- [20] Mahsun, Mohamad, Firma. S, dan Heribertus. (2006), *Akuntansi Sektor Publik*. Ed 1. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- [21] Nuryanti, W. (2012), Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD, desentralisasi sebagai variabel moderating. Skripsi.
- [22] Oktaviani, Ayu. (2003), Pengaruh Desentralisasi pengambilan keputusan terhadap kinerja manajerial Dinas.Tesis. Universitas Diponegoro.
- [23] Puspitasari, N. L. P., Bendesa. I. K. G. (2016), Analisis kualitas pelayanan public di badan pelayanan perijinan terpadu Kabupaten Badung. *Jurnal ekonomi dan bisnis*. ISSN: 2337-3067.
- [24] Primadana, G. H. M., Yuniarta, G. A., Adiputra, M. P. (2014), Pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi empiris pada pemerintah Kabupaten

- Badung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ghanesha Jurusan Akuntansi Program S1, 2(1), 1-11.
- [25] Robbins, S. P., Judge, T. A. (2016), *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba empat. Edisi 16. Halaman 336. ISBN: 978-979-061-515-1.
- [26] Sigilipu, S. (2013), Pengaruh penerapan informasi akuntansi manajemen dan sistem pengukuran kinerja terhadap kinerja mnajerial. *Jurnal EMBA*. ISSN: 2303-1174. Vol. 1, No.3.
- [27] umolang, J. H. (2015), Pengaruh teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap kinerja manajerial dengan Karakteristik system akuntansi manajemen sebagai variabel intervening. Vol. 2, No. 1.
- [28] Sugiyono. (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabet. Bandung.
- [29] Tarjono, dan Nugraha, A. (2015), Pengaruh partisipasi anggaran dan desentralisasi organisasi terhadap kinerja manajerial dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi (Studi analisis pada pemerintah Kabupaten Pematang). *Media ekonomi dan manajemen*, 30(1), 85-100.
- [30] Wahyuni, R., Rasuli, M., Diyanto, V. (2014), Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasidan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah (Studi empiris pada SKPD pemerintah Kota Pekanbaru) *Jom Fekom*, 2(2), 1-15.
- [31] Wulandari, Nur Endah. (2011), Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi sebagai Variable Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Jawa Tengah.